

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 yang berkembang di Indonesia sejak awal Maret 2020 telah menyebabkan berbagai dampak serius bukan hanya di bidang kesehatan dan *human security*, namun juga bidang perekonomian dan kemasyarakatan. Dalam menangani pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

- a. Implementasi PPKM di wilayah DKI Jakarta merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan perangkat aturan meliputi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2020, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2020 sebagai regulasi (payung hukum) dalam pelaksanaan PPKM di wilayah DKI Jakarta.
- b. Implementasi PPKM di wilayah DKI Jakarta dijalankan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang ternyata menghadapi reaksi pro dan kontra baik di tingkat masyarakat hingga elit politik. Kelompok elit pendukung berasal dari kelompok koalisi pemerintah diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan beberapa partai lainnya yang menganggap PPKM menjadi kebijakan publik yang penting untuk dijalankan untuk meredam perkembangan pandemi Covid-19 yang terus meningkat, sedangkan kelompok oposisi diantaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap implementasi PPKM menunjukkan ketidakadilan dan merugikan kelompok masyarakat kapisan bawah. Hal yang sama juga disingkapi oleh kalangan masyarakat yang menganggap bahwa PPKM perlu untuk dijalankan untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan, namun berbagai kerugian yang ditimbulkan juga perlu untuk diantisipasi secara serius oleh pemerintah bersama stakeholder yang ada.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PPKM yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 di wilayah DKI Jakarta untuk menangani pandemi Covid-19 sebenarnya dapat diterima oleh semua kalangan baik elit politik oposisi dan koalisi ataupun masyarakat DKI, namun dampak sosial-ekonomi dan ketidakadilan menjadi preseden buruk diantara keduanya.

- c. Dampak kebijakan PPKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak positif yaitu penurunan angka pandemi positif Covid-19 yang menjadikan pemulihan wabah ini dapat berjalan dengan cepat dan dampak negatif yaitu depresiasi sosial-ekonomi yang menyebabkan kemiskinan akibat terganggunya roda perekonomian di sektor-sektor persagangan, swasta dan lain-lainnya akibat pembatasan dan interaksi di kalangan masyarakat DKI Jakarta dan kondisi ini menyebabkan legitimasi masyarakat kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta menjadi terganggu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak implementasi PPKM sebagai kebijakan administratif publik tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi seluruh kepentingan elit politik dan masyarakat, namun pemerintah DKI sebagai stakeholder harus memprioritaskan kepentingan yang terbesar yaitu keselamatan warga DKI Jakarta dari pandemi Covid-19 tersebut.

V.2 Saran

Pada penelitian ini penulis akan memberikan saran kepada akademisi dan stakeholder PPKM masing-masing yaitu:

- a. Kepada akademisi program studi ilmu politik perlu untuk mengembangkan penelitian tentang implementasi PPKM di wilayah lainnya, seperti halnya Jawa Barat ataupun Jawa Tengah sehingga mampu berperan sebagai perbandingan.
- b. Kepada stakeholder PPKM perlu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih solutif karena penerapan PPKM secara faktual juga berkontribusi dalam penurunan sektor ekonomi masyarakat, khususnya menengah bawah sehingga diperlukan skema-skema bisnis masyarakat secara aman diantaranya tanpa melalui tatap muka dan pelibatan masyarakat secara masif.